

BAB V

PERTARUNGAN SIMBOLIK DALAM PRODUKSI KURIKULUM SOSIOLOGI SMA

5.1 Pengantar

Bab ini akan memperdalam bab sebelumnya yang menjelaskan tentang wacana dominan dalam kurikulum Sosiologi SMA. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya keteraturan sosial merupakan wacana dominan yang diproduksi dalam kurikulum Sosiologi SMA. Pada saat Orde Baru, misalnya, materi Keteraturan Sosial menjadi penting dalam konteks diskursus pembangunan. Artinya, atas nama pembangunan semua harus dilakukan. Dengan demikian, bab ini sebenarnya ingin mengabstraksikan bagaimana konstruksi wacana dominan dalam kurikulum sosiologi SMA. Bagian berikutnya akan menjelaskan pertarungan simbolik agen-agen yang terlibat dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA tersebut. Adanya wacana dominan ini seperti yang dijelaskan Bourdieu bahwa di setiap ranah selalu ada wacana dominan dan wacana marjinal. Wacana dominan akan terus berusaha mempertahankan keberadaannya, sedangkan wacana marjinal akan berusaha untuk menjatuhkannya.

Bagian ini juga akan menjelaskan agen yang terlibat dalam kontestasi kekuasaan pendidikan Indonesia. Pembahasan ini dijelaskan dalam dua fase berbeda yaitu fase Orde Baru dan fase pasca Orde Baru. Beberapa agen penting dalam Orde Baru yaitu Puskur, Pusbuk, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), konsorsium ilmu. Fase pasca Orde Baru direpresentasikan melalui kehadiran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Meski demikian, lokus studi ini tetap pada keberadaan BSNP sebagai agen penting dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA pasca Orde Baru. Analisa agen fase Orde Baru dilakukan untuk melihat metamorfosa kekuasaan yang terjadi dalam ranah pendidikan Indonesia.

5.2 Pertarungan Wacana Simbolik

Kurikulum Sosiologi SMA berdasarkan analisa di bagian sebelumnya sangat kental dengan beberapa wacana dominan yang menjadi praktek kekuasaan kelompok

dominan. Jika dirunut ulang, wacana-wacana dominan tersebut antara lain keteraturan sosial, modernisasi, dan pembangunan. Di bawah ini akan dijelaskan konstruksi wacana tersebut sebagai manifestasi dari pertarungan simbolik kekuasaan. Hal tersebut didasarkan pada strategi penelitian yang digunakan bahwa wacana dominan yang berbentuk teks tersebut selalu dikaitkan dengan konteks ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian, analisisnya akan bergerak pada level mikro. Analisa ini lazim dilakukan berbagai studi yang mencoba menelisik pertalian wacana dengan *discourse*. *Out putnya* adalah akan tampak makna terselubung dibalik keberadaan teks-teks tersebut.

5.2.1 Keteraturan Sosial sebagai *Doxa*

Orde Baru yang menggalakkan pembangunan sejak 1966-1967 berkepentingan kuat menjalan pembangunan secara utuh, murni dan konsekuen. Semua harus dilaksanakan atas nama pembangunan. Pembangunan Indonesia dilaksanakan dengan mengacu kepada GBHN yang diturunkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejak 1967, berbagai usaha pembangunan terutama ekonomi dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan stabilitas politik dan pemerataan pendapatan. Di samping itu, pembangunan pertanian juga menjadi prioritas utama pembangunan sebagai landasan untuk mengadakan industrialisasi.¹

Pembangunan Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan terencana. Seperti tertuang dalam GBHN, pembangunan nasional disusun dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 tahun sampai 30 tahun. Pola umum jangka panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun yang penyusunannya berupa Repelita diserahkan kepada Presiden/Mandataris MPR. Ini merupakan salah satu strategi politik yang dioperasikan melalui kebijakan kurikulum. Tanpa disadari, muatan kurikulum sosiologi juga menjadi alat pengukuhan kekuasaan negara terhadap masyarakat. Dalam pandangan Nugroho, kurikulum menjadi arena intervensi negara melalui pembentukan berbagai konsorsium yang relevan untuk

¹ Wacana ini sebenarnya hampir dilansir oleh seluruh buku teks pelajaran Sosiologi SMA pada masa Orde Baru. Salah satu buku lain yang ditulis, sebagai pembanding, lihat Trijono, Lambang dan Suharko (1998). *Sosiologi 2 untuk SMU Kelas 3*. Jakarta:Depdikbud, hal. 144-145

mendukung pembangunan dan distandarisasi menjadi Kurikulum Nasional (Kurnas).² Dalam prakteknya, kurikulum tak lagi terkonsentrasi dalam filosofi pendidikan dan pembelajaran, tetapi hanya menempatkan praktik pendidikan sebagai instrumen belaka. Pendidikan ini hanya menghasilkan manusia yang taat pada kepentingan kekuasaan.

Artikulasi wacana keteraturan sosial dalam pelajaran sosiologi SMA sebenarnya mencerminkan kondisi ilmu sosial Indonesia secara lebih luas. Ignas Kleden menyebutnya dengan 'penjinakkan ideologis' pada saat penetapan GBHN tahun 1983.³ Menurut Kleden saat itu, GBHN secara resmi menyatakan bahwa pembangunan nasional tak melulu menggunakan pendekatan ekonomi, tapi mencakup pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Konsekuensinya, pendekatan ilmu-ilmu sosial tak lagi dianggap sebelah mata. Akhirnya, orientasi pengembangan ilmu-ilmu sosial saat itu hanya bertumpu pada masalah-masalah pokok pembangunan nasional. Ringkasnya, ilmu sosial yang diturunkan dalam berbagai mata pelajaran di bangku sekolah hanya diorientasikan pada ranah teknis instrumental semata.

Dalam sejarah pendidikan nasional perdebatan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Pada saat Fuad Hasan menjabat Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) pernah berpolemik dengan Menristek Habibie mengenai tujuan dasar pendidikan nasional⁴. Perdebatan itu bermuara pada dua pendapat. Menurut Fuad Hasan, merujuk Soedjatmoko, pendidikan harus dikaitkan dengan pertumbuhan kemanusiaan, perkembangan sifat-sifat sosial dan pribadi seseorang. Intinya, pendidikan merupakan proyek kultural etis. Habibie yang berseberangan dengan Fuad menganggap pendidikan yang menghasilkan orang-orang terlatih yang siap pakai. Intinya, pendidikan dianggap proyek teknis semata.

Apa yang menjadi klaim kelompok teknokrat yang dipimpin Habibie sebagai ekspansi kultural proyek modernitas yang membawa pendidikan ke ranah kapitalisme. Hasilnya, menjadikan pendidikan Indonesia miskin dari kebebasan berpikir dan memiliki

² Nugroho, Heru, *Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas sebagai Arena Perebutan Kekuasaan* dalam Hadiz, Veri R dan Dhakidae Daniel (ed), (2006). *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing. hal. 185.

³ Kleden, Ignas (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta:LP3ES, hal. 9. Lihat juga Kleden, Ignas (1997). *Ilmu Sosial di Indonesia: Tindakan dan Refleksi dalam Perspektif Asia Tenggara* dalam Nordholt, Nico Schulte dan Leontine Visser (1997).(ed). *Ilmu Sosial di Asia Tenggara dari Partikularisme ke Universalisme*. Jakarta:LP3ES, hal. 11

⁴ Kleden, ibid.

nalar yang menentukan masa depannya.⁵ Satu hal yang tak dapat dipisahkan dari terhegemoninya kurikulum sosiologi secara lebih khusus dan ilmu sosial umumnya karena orientasi pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan ekonomi melalui jargon pertumbuhan ekonomi. Ilmu sosial termarginalkan, kalah oleh hingar bingarnya ekonomi sebagai wacana dominan pembangunan nasional. Alih-alih, ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang terjadi adalah---meminjam Pryhantoro dan Nugroho---memunculkan 'budaya diam' (*silent culture*). Hal itu merembes ke seluruh instrumen pendidikan nasional, terutama diturunkan melalui perangkat kurikulum.

Penjelasan diatas ingin menggambarkan bahwa praktek pendidikan tak bisa dipisahkan dalam perjalanan pembangunan yang sedang sedang gencar dilakukan. Pendidikan harus diajarkan atas nama pembangunan sekaligus 'mengamankan' pembangunan. Wacana keteraturan sosial sebagaimana menjadi *mainstream* dalam kurikulum Sosiologi SMA dapat dilihat dalam konteks konsolidasi kekuasaan Orde Baru pasca Orde Lama tumbang. Pada saat Orde lama berkuasa, berbagai kebijakan ekonomi maupun politik tak kunjung reda sampai dengan Orde Lama tumbang. Bahkan, tak kunjung membawa perubahan berarti terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Akibatnya, pasca Orde Lama, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang diintrodusir oleh rezim Orde Baru dilakukan bersamaan dengan menciptakan stabilitas politik dan pemerataan pendidikan. Tidak heran jika pembangunan nasional sejak Pelita I dan Pelita II, pembangunan diupayakan untuk menciptakan setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi nasional di satu sisi, dan di sisi lain menekan sekecil-kecilnya konflik politik dan sosial untuk terciptanya stabilitas nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Singkatnya, dalam kekuasaan awal-awal Orde Baru yang terus bertahan sampai Orde Baru tumbang dapat dirumuskan sebagai "memaksimalisasi pertumbuhan ekonomi" dan "meminimalisasi" konflik-konflik politik di masyarakat⁶.

Menarik untuk lebih fokus bagaimana Orde Baru menciptakan stabilitas politik⁷, meski tidak dapat dipisahkan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Saat itu, stabilitas

⁵ Pryhantoro dan Nugroho, (2002), *Paradoks Modernitas dalam Pembangunan; Diskursus tentang Kapitalisme Menjelang Runtuhnya Orde Baru* dalam *Jurnal Sosiohumanika*, Volume 15, Nomor 1/Januari 2002, hal. 124

⁶ Istilah ini dikutip Trijono seperti mengacu kepada Mas' oed, *ibid.* hal. 147

⁷ Orde Baru sangat produktif dalam mengintrodusir berbagai idiom dalam rangka melegitimasi praktek pembangunan. Dalam berbagai literatur/buku teks pelajaran Sosiologi SMA, idiom yang diproduksi adalah 'stabilitas nasional'. Konsep ketertiban politik salah satunya diintrodusir oleh Mas' oed.

politik merupakan *entry point* dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Orde Baru melakukan berbagai cara kebijakan dalam menciptakan stabilitas politik, misalnya dilakukan melalui pengorganisasian, penertiban atau kontrol terhadap organisasi politik. Keluarlah UU No. 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila yang sangat polemik waktu itu terutama dikalangan organisasi Islam. Sebelum 1985, persisnya sebagai strategi konsolidasi kekuasaan, Orde Baru sebenarnya sudah menerapkan interpretasi ideologis yang bersifat---dalam bahasa Hadiz---organistik dan korporatis⁸. Kebijakan ini dilakukan untuk meredam berbagai kelompok yang dianggap sumber pengganggu stabilitas politik dan hambatan bagi pembangunan ekonomi. Hadiz, misalnya, ketika menjelaskan hal itu menyebut kelompok buruh yang dianggap kelompok sosial yang paling sering mengganggu stabilitas politik Orde Baru melalui berbagai *labelling* komunis terhadap gerakan mereka pada saat Orde Baru.

Pendidikan merupakan salah satu varian lain dari praktek terciptanya stabilitas politik. Ranah ini merupakan ranah yang dianggap paling efektif dalam menanamkan kekuasaan negara melalui seperangkat aturan, nilai berupa teks yang sistematis melalui kurikulum. Dianggap paling efektif sebagai ranah kekuasaan oleh negara, karena berbagai kelompok menganggap gejala ini sebagai sesuatu yang *given* dan *taken for granted*. Gejala ini berlangsung terus menerus sepanjang kurikulum ada dalam pergulatan kebangsaan dan itu berlangsung secara massal sejak seseorang mengenyam bangku pendidikan. Gejala ini sudah diingatkan Bourdieu bahwa sekolah---melalui kurikulum---hanya mereproduksi sosial, ekonomi dan ketimpangan setiap individunya. Tetapi analisa Bourdieu tidak cukup sampai disitu, dalam reproduksi sosial, ekonomi dan kultural sebenarnya terjadi pertarungan wacana dan kekuasaan simbolik.

Analisa Bourdieu ini juga didukung dengan penjelasan Huntington. Huntington sebagaimana dikutip Hadiz, menjelaskan bahwa diakhir 1960-an telah mengisyaratkan suatu penekanan baru yang dengan efektif mendefinisikan modernitas berdasarkan pemeliharaan yang berhasil atas stabilitas politik. Dalam rangka menciptakan itu, para elit dan institusi negara semakin dijabarkan berdasarkan suatu kemampuan untuk mencegah revolusi yang yang dianggap sinonim dengan kemerosotan ke dalam bentuk-

⁸ Lihat Hadiz, Vedi R (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto* (terjemahan) Jakarta:LP3ES, hal. 63

bentuk anarki dan kekacauan. Salah satu institusi negara tersebut adalah institusi pendidikan dengan berbagai perangkat dan mekanisme kontrolnya. Berbagai wacana tersebut dalam pandangan Bourdieu sebenarnya bukanlah sekadar wacana yang diharapkan dapat dipahami oleh penerima, dalam hal ini guru maupun murid. Bourdieu juga menganggap bahwa wacana---dalam hal ini kurikulum---merupakan sekumpulan tanda atau simbol yang bertujuan dinilai dan diapresiasi atau bertujuan untuk dipercaya dan dipatuhi.

“...dipercaya dan dipatuhi menunjukkan otoritas yang ingin dicapai oleh pelaku sosial. Otoritas ini adalah bentuk kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan simbolik”.⁹

Dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA 2006, BSNP sangat dominan dan lekat dengan wacana keteraturan sosial sebagai wacana dominan. Pada Orde Baru, dominasi tersebut dilakukan Puskur. Bourdieu menyebutnya dengan *doxa*. Pada saat kurikulum yang diturunkan melalui buku teks sudah mendominasi pasar, dia menjadi norma yang diterima kebenarannya. *Doxa* dalam pandangan Bourdieu adalah wacana yang kita terima begitu saja sebagai kebenaran dan tidak pernah lagi dipertanyakan sebab-sebabnya, apalagi kebenarannya. *Doxa* bisa berbentuk kebiasaan-kebiasaan atau wacana lain yang lebih luas, yaitu kepercayaan maupun ideologi.

Dalam menjelaskan itu, Bourdieu menganggap bahwa *doxa* akan berhadapan dengan wacana-wacana marjinal yang disebut *heterodoxa*. *Doxa* dan *heterodoxa* selalu ada dalam ranah sosial. *Doxa* akan terus berusaha mempertahankan keberadaannya, sedangkan *heterodoxa* akan berusaha untuk menjatuhkannya. *Heterodoxa* adalah wacana yang bertentangan dengan *doxa*, sedangkan *orthodoxa* adalah wacana-wacana yang terus berusaha mempertahankan *doxa*. *Doxa* selalu didukung oleh kelompok sosial yang dominan dan berkuasa serta menikmati *status quo*. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan *doxa* tersebut. Dalam kurikulum Sosiologi SMA, selain keteraturan sosial yang dianggap *doxa* juga terdapat wacana lainnya yaitu modernisasi dan pembangunan. Wacana yang termasuk *heterodoxa* dapat disebut antara lain adalah

⁹ Sumariella, op.cit, hal. 35

kritik pembangunan¹⁰, *good governance*¹¹, demokrasi¹², isu lingkungan, isu korupsi. Wacana-wacana ini relatif belum *familiar* dalam kurikulum sosiologi SMA. Pada Kurikulum 1984 sebagaimana dijelaskan dalam buku terbitan GPM misalnya, diberikan materi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu sub bagian dari materi pokok Individu sebagai *Warga Masyarakat, Warga Negara dan Warga Dunia*.¹³ Tetapi, penjelasan tentang HAM hanya menjelaskan secara normatif tentang jenis-jenis hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Pada konteks sosial-politik, penjelasan itu dapat dimafhumi sebagai satu kontrol negara terhadap warga masyarakatnya untuk tidak berbicara selain hal-hal normatif yang dianggap sensitif dan mengganggu ketertiban sosial-politik. Singkatnya, jika membahas diluar hal normatif dalam materi HAM dianggap merongrong kekuasaan negara. *Labelling* subversif dapat diberikan kepada siapapun yang melakukan hal tersebut. Mengenai keteraturan social yang menjadi wacana dominant dalam buku sosiologi SMA, hal tersebut juga dijelaskan oleh penerbit GPM :

“...kita harus bisa meniti buih. Artinya, contoh-contoh yang ditampilkan harus untuk menyajikan kebaikan untuk kita semua. Buku Sosiologi yang diterbitkan berusaha menghindari segala sesuatu yang bersifat antagonistis. Kalau contoh antagonistis tapi harus ke arah keseimbangan sikap. Tidak boleh ekstrim, segala sesuatu itu harus harmoni dengan segala perbedaan. Kita berupaya membawa murid menghargai perbedaan menuju harmonis. Saya bisa saja memberi contoh untuk memprovokasi siswa untuk mengkritik kemapanan, tapi untuk apa. Sosiologi iu harus tahu *factnya*. *Fact* tersebut harus mendapatkan nilai lebih. Semuanya harus menuju keseimbangan hidup. Kita tidak meninggalkan kaidah ilmiah. Bisa membawa hal-hal ilmiah bisa meredam sesuatu yang ekstrim. Melalui pembelajaran sosiologi harus menyumbang kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, menghargai perbedaan dan keanekaragaman, tidak ada yang merasa rendah. Kita ingin agar masyarakat itu mencapai keseimbangan. Pada prinsipnya sosiologi itu berbasis empiris.”¹⁴

¹⁰ Dalam kekuasaan Orde Baru, ini merupakan wacana yang sangat sensitif di tengah *mainstream* pembangunan. Saat itu seluruh buku teks pelajaran Sosiologi SMA hanya menampilkan keberhasilan dan kesuksesan pembangunan. Daniel Fernandez, penulis buku dari Galaxy Puspa Mega, pernah menulis tentang dampak samping pembangunan. Tetapi itu juga hanya dibahas sangat sedikit. Hal yang sama dialami Lambang Trijono dan Suharko. Keberhasilan program KB atau intensifikasi pertanian pada era Orde Baru menjadi contoh pembahasan dalam buku tersebut.

¹¹ Dalam kurikulum 2004 (KBK), semangatnya memang kepada isu-isu kontemporer. Salah satu diantaranya adalah *good governance*, tetapi itu belum secara aplikatif dirumuskan dalam kurikulum dan materi pembelajaran.

¹² Kurikulum Orde Baru juga mengintrodusir konsep demokrasi, tetapi demokrasi yang dipahami dalam konteks basis legitimasi dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru, yaitu terminologi ‘demokrasi Pancasila’.

¹³ Lihat Luth, Nursal dan Daniel Fernandez (1986). *Sosiologi dan Antropologi Jilid II*. Jakarta:PT Galaxy Puspa Mega, hal. 5

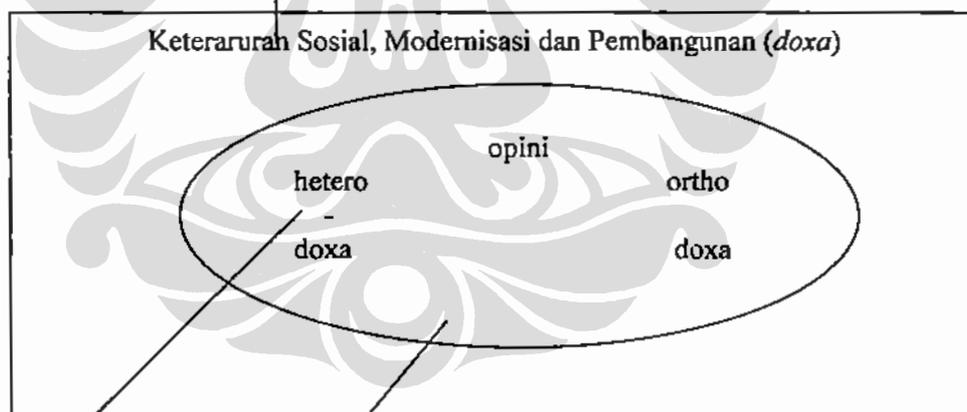
¹⁴ Wawancara Stephanus Suparna, Direktur PT Galaxy Puspa Mega. 24 Juni 2008

Wacana keteraturan sosial yang diproduksi rezim Orde Baru selain menjadi *doxa*, juga mengalami reproduksi secara permanen. Orde Baru mengelaborasi apa yang dipandang menjadi tugas pemerintah yaitu menciptakan indigenisme, yaitu menjaga warisan tradisional. Praktek ini dilakukan dengan jalan menjaga kesatuan nasional, mengimplementasikan pembangunan dan menegakkan stabilitas politik. Semua itu dipandang bertentangan dengan westernisme, disintegrasi nasional, kekacauan ekonomi, dan instabilitas politik sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1950-an.¹⁵ Di sisi lain, wacana masyarakat multikultural sebenarnya sudah mulai menjadi tema pembahasan di SMA sejak Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006, tetapi analisisnya mengalami reduksi. Wacana multikultural hanya dipahami sebagai masyarakat majemuk *an sich*. Untuk menjelaskan hal tersebut dijelaskan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 5.1

***Doxa* dalam Kurikulum Sosiologi SMA**

Dunia yang tidak dipertanyakan lagi



Kurikulum

Kritik pembangunan,
demokrasi, *good governance*, isu korupsi,
isu jender dan lingkungan

¹⁵ Philpott, Simon (2003). *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme* (judul asli: *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*). Yogyakarta: LKiS, hal. 241.

5.2.2 Modernisasi dan Pembangunan: Dominasi *Rezim Developmentalis Represif* dalam Buku Teks Pelajaran Sosiologi SMA 1984

Kurikulum Sosiologi SMA 1984 (dan juga kurikulum era Orde Baru) menjadi pertarungan wacana tema modernisasi sebagai salah satu *mainstream* pembangunan Indonesia. Wacana ini dapat dilihat secara dominan pada Kurikulum era Orde Baru. Wacana modernisasi masih terlihat pada kurikulum pasca Orde Baru meski tidak terlalu dominan. Wacana modernisasi diadopsi negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia sebagai upaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal. Dalam konteks Indonesia, modernisasi dipahami sebagai perubahan mental dari tradisional kepada modern. Hal tersebut dapat dilihat dari materi-materi Bahasa sederhananya dilihat melalui mentalitas, etos kerja. Berbagai varian ini jika dirunut jauh ke belakang mengadopsi beberapa pemikiran seperti Weber yang melihat variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan dunia ketiga. Selain Weber, McClelland juga meyakini kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi (*the need for achievement*) secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan¹⁶.

Wacana modernisasi yang sangat kental dalam kurikulum Sosiologi SMA menunjukkan ranah pendidikan tak bisa steril dari pengaruh modernisasi. Wacana modernisasi sebagai diadopsi oleh negara-negara dunia eks kolonial diadopsi sebagai model pembangunan yang paling tepat untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam buku pelajaran GPM, materi ini menjadi salah satu materi pokok yang diajarkan kepada murid-murid. Hampir semua buku pelajaran sosiologi menjadikan materi modernisasi sebagai salah satu materi pokok.¹⁷ Modernisasi dalam buku terbitan GPM dijelaskan sebagai :

¹⁶ Lihat Haryadi, Agus, *Kemanusiaan, Teori Modernisasi, dan Dependensi dalam Kompas*, tanpa tanggal dan tahun. Lihat juga Fakih, Mansour (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 53-54

¹⁷ Lihat juga Maryati, Kun dan Juju Suryawati (2001). *Sosiologi 2 untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: Esis, hal. 166. Buku ini masih menggunakan Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999. Buku ini menjelaskan modernisasi sebagai : "menyangkut perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, serta struktur social masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern (sesuai tuntutan zaman). Adapun gejala modernisasi ditandai dengan majunya pendidikan, teknologi, dan perekonomian, serta pesatnya

“...modernisasi dapat diartikan sebagai satu sikap yang mempunyai kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru daripada yang bersifat tradisi dan satu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi adat kepada berbagai kebutuhan yang baru”¹⁸

Politik korporatisme yang dikembangkan Orde Baru melalui ideologi Pancasila dan pembangunanisme menjadi catatan penting selama Orde Baru berkuasa. Pasca Orde Baru, polanya masih belum terlalu mencolok. Namun demikian, tetap saja pengaruh dan ‘warisan’ Orde Baru masih ‘berceceran’ di beberapa kelompok sosial tertentu. Wacana modernisasi yang meresap dalam kurikulum sosiologi SMA banyak menerima warisan pemikiran dari teori evolusi dan teori fungsionalisme. Dalam pandangan Suwarsono dan So¹⁹, pengaruh dari teori evolusi telah terbukti mampu membantu menjelaskan proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara Eropa Barat, selain juga mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dalam proses modernisasinya. Secara garis besar, teori evolusi perkembangan masyarakat dari masyarakat primitif ke masyarakat lebih maju. Tradisi pemikiran lain yang banyak mempengaruhi perspektif modernisasi adalah teori fungsionalisme yang---antara lain---dikembangkan Talcott Parsons. Ada dua gagasan utama Parsons dalam menjelaskan modernisasi. *Pertama*, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Parsons menggunakan konsep “sistem” untuk menggambarkan koordinasi harmonis antarlembaga tersebut. *Kedua*, setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Kata kuncinya terletak pada stabilitas masyarakat. Singkatnya, dalam pandangan Parsons, masyarakat dianggap selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang, dan mapan.

Gejala diatas sangat kental dalam kurikulum Sosiologi SMA. Kurikulum Sosiologi SMA menjadi ruang yang efektif dalam mengartikulasikan wacana modernisasi. Dalam bidang pertanian, misalnya, sebagaimana menjadi keberhasilan Orde

urbanisasi” (hal. 167). Meski diterbitkan dalam konteks pasca Orde Baru, tetapi modernisasi masih menjadi materi dominan. Hal tersebut menunjukkan modernisasi menjadi mainstream dalam ranah pendidikan Indonesia.

¹⁸ Luth, Nursal dan Daniel Fernandez (1986). *Sosiologi dan Antropologi Jilid II*. Jakarta:Galaxy Puspa Mega, hal. 75.

¹⁹ Suwarsono dan Alvin Y. So (2006). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta:LP3ES, hal. 9

Baru. Di beberapa buku dijelaskan bagaimana revolusi hijau mampu meningkatkan pertumbuhan produksi pertanian melalui penggunaan teknologi dan cara produksi modern dalam sektor pertanian. Ulasan diatas mengenai berbagai idiom yang diproduksi negara (stabilitas politik, ketertiban politik), keteraturan sosial serta pembangunan yang menjadi *doxa* dalam pertarungan simbolik melalui kurikulum Sosiologi SMA menjadi satu refleksi bagaimana kurikulum Sosiologi SMA menjadi ruang berlangsungnya praktek kekuasaan apa yang disebut Herbert Feith dengan “rezim developmentalis represif” (RDR)²⁰. Feith menjelaskan RDR sebagai model terbaik strategi modernisasi dari atas ke bawah yang terpusat yang banyak didukung oleh para ahli ekonomi kapitalis dan teknokrat. Dalam menjelaskan RDR, Feith sebagaimana mengambil kasus Brasil, Iran, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, menggambarkan RDR dengan dua karakteristiknya. *Pertama*, tema ideologis yang paling jelas adalah mencerminkan keadaan dimana rezim-rezim ini lahir developmentalisme, yaitu gagasan bahwa tugas negara adalah mencapai pembangunan yang cepat “untuk mengatasi keterbelakangan dan menyusuli negara-negara maju”. *Kedua*, sifat represif rezim-rezim tersebut sebagaimana dijelaskan Feith diperkuat maupun dilengkapi dengan tema-tema ideologisnya. Rezim memproduksi berbagai tuntutan moral negara dengan berbagai idiom khasnya: disiplin nasional, persatuan nasional, bagaimana pentingnya stabilitas guna pembangunan nasional.

Konsepsi RDR Feith yang sudah dijelaskan diatas sebenarnya juga terjadi melalui praktek pendidikan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Rezim pasca Orde Baru tidak lagi bertumpu pada pola yang dikemukakan Feith. Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan melalui konstruksi wacana dominan: keteraturan sosial, modernisasi dan pembangunan sebagai *doxa* berada dibawah pengaruh dan kendali kekuasaan RDR. *Pertama*, muatan kurikulum Sosiologi SMA merefleksikan pertarungan ideologi pembangunanisme dengan berbagai variannya. Hal tersebut dapat dilihat dari wacana-wacana dominan yang ada terutama pada Kurikulum Orde Baru (1984 dan 1994). Kurikulum 2004 masih sedikit menjelaskan wacana modernisasi dan pembangunan, tapi tidak seindoktrinasi pada kurikulum Orde Baru. *Kedua*, berbagai idiom represif yang

²⁰ Feith, Herbert (1980). *Rezim-rezim Developmentalis Represif di Asia: Kekuatan Lama, Kerawan Baru* dalam *Prisma* No. 11. November 1980/Tahun IX, hal. 72

diproduksi rezim sangat kental dalam kurikulum Sosiologi SMA: keteraturan sosial, stabilitas politik dan sebagainya. Semuanya seolah menjadi satu ruang artikulasi sekaligus pertarungan simbolik bagaimana wacana *developmentalism* diproduksi sekaligus direproduksi dalam ranah kurikulum. Konsepsi Feith tentang RDR tampaknya sejalan dengan penjelasan Philpott yang menjelaskan bahwa pembangunan yang menjadi ideologi Orde Baru mengasumsikan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang produktif dan menjadikan subjek individu sebagai sasaran utamanya. Diskursus pembangunan Orde Baru didasarkan pada penggunaan berbagai teknik dan teknologi di berbagai institusi baik institusi hukuman ataupun bukan, termasuk sekolah, klinik kesehatan, kelompok kepentingan, program KB, transmigrasi maupun birokrasi.²¹ Jika sekolah menjadi institusi beroperasinya kekuasaan maka itu dijalankan dengan mekanisme pemberlakuan kurikulum untuk seluruh jenjang pendidikan. Dengan cara ini kekuasaan dapat dipertahankan secara permanen.

5.3 Kontestasi dalam Ranah Kurikulum Era Orde Baru

Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, pertarungan kekuasaan dalam kurikulum 2006 sebagaimana menjadi fokus utama studi ini adalah direpresentasikan dengan keberadaan BSNP sebagai otoritas pendidikan dan penulis-penerbit. Bourdieu menjelaskan kapital simbolik sebagai akumulasi kehormatan dan penghargaan yang dimiliki masing-masing agen. Menurut Bourdieu, jenis kapital ini tidak terlihat namun dapat dimiliki dalam bentuk pengakuan dan otoritas. Produksi kurikulum Sosiologi yang dihasilkan melalui pertarungan simbolik pada dasarnya juga berjuang mendapatkan modal simbolik tersebut. Dalam pertarungan tersebut akan terlihat bagaimana agen-agen yang terlibat berjuang sekaligus mempertahankan posisi untuk mendapatkan berbagai kapital. Sebelum menjelaskan bagaimana kontestasi berlangsung sejak kehadiran BSNP sesuai dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, terlebih dahulu dijelaskan bagaimana berlangsungnya kontestasi antar agen dalam era Orde Baru. Beberapa agen tersebut antara lain Pusat Kurikulum (Puskur), Pusat Perbukuan Nasional (Pusbuk), Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) serta konsorsium ilmu. Hal ini menarik

²¹ Philpott, Simon, *op.cit*, hal. 138

mengingat akan terlihat metamorfosa kekuasaan dalam ranah pendidikan ketika Orde Baru berkuasa hingga kondisi saat ini.

Pada saat era Orde Baru berkuasa, Puskur memiliki wewenang yang sangat luas dalam produksi kurikulum pelajaran semua jenjang pendidikan. Puskur merupakan salah satu unit dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas. Puskur memiliki wewenang mengembangkan standar nasional yang terdiri dari standar pokok. Posisi PusKur mengalami pergeseran peran pada saat Orde Baru dan pasca Orde Baru. Pada Orde Baru, Puskur merupakan agen yang memiliki peran dominan dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA. Puskur mengembangkan berbagai instrumen kurikulum seperti GBPP yang mencakup tujuan pengajaran, pokok bahasan, ruang lingkup, dan sebagainya. Seorang staf Puskur menjelaskan :

“saat Orde Baru kalau nama orang Puskur (sebagai pengarah) tertera dalam buku pelajaran berjejer dengan pejabat Depdikbud atau Dinas/sangat mujarab penjualannya. Pola itu berlangsung sampai Orde Baru. Banyak penerbit buku yang melakukan pola itu hanya untuk kepentingan distribusi dan jaringan bisnis mereka ke tiap sekolah di seluruh daerah. Penerbit masuk ke birokrasi dan akhirnya bisnis. Penerbit butuh pasar. Pasar juga selalu membutuhkan birokrasi”²²

Saat Orde Baru berkuasa, posisi Puskur sangat strategis. Pola itu berlangsung sejak 1984 hingga akhir 1995. Dalam deretan nama di sebuah buku, banyak nama yang tidak bekerja sebagai pengarah. Tujuan yang ingin dicapai adalah distribusi luas, buku-buku yang digunakan juga seragam di seluruh daerah. Saat ini sudah tidak ada pencantuman nama yang digunakan pada saat Orde Baru. Pola itu berakhir sejak akhir 1995-1996. Wacana desentralisasi akhirnya menyebabkan posisi dan wewenang Puskur bergeser. Posisi itu diambil oleh agen lain yang justru sangat dominan dalam produksi kurikulum yaitu BSNP. Setelah lahirnya BSNP melalui PP 19/2005, Puskur tidak lagi terlibat dalam proses ini. Puskur tidak dapat langsung ke sekolah, hanya sampai ke kota/kabupaten melalui Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam melakukan Bantuan Profesional (Banprof). Saat itu polanya penerbit menggandeng orang-orang penting untuk menggandeng sosialisasi ke berbagai daerah untuk sosialisasi. Akibatnya dari pola itu adalah buku-buku yang digunakan seragam di kebanyakan sekolah. Setelah lahirnya BSNP, Puskur tidak lagi terlibat dalam proses ini. Secara institusi tidak, secara personal

²²Wawancara Drs. Zulfikri, M.Ed, Staf Puskur yang mengembangkan Kurikulum Sosiologi-Antropologi SMA, 13 Mei 2008.

mereka banyak yang menjadi penulis buku atau editor. Tugas Puskur saat ini hanya mengembangkan model kurikulum KTSP dan model bahan ajar. Model bahan ajar itu antara lain buku. Penerbit banyak menggunakan orang-orang BSNP dalam mensosialisasikan buku. Berdasarkan informasi dari beberapa informan, pada dasarnya pola ini tidak masalah, tetapi efeknya proses birokrasi di pendidikan kita sangat paternalistik. Guru itu tidak peduli isi dan kualitasnya bagus atau tidak. Yang penting buku disosialisasikan oleh orang-orang penting. Saat ini tampak kelihatan bahwa guru-guru hanya melihat yang penting buku itu ada tulisan KTSP terlepas dari kualitas bagus atau tidak.

Selain Puskur yang memiliki peran penting dalam ranah pendidikan era Orde Baru, terdapat juga Pusbuk yang tidak kalah pentingnya dengan keberadaan Puskur. Sebagai agen penting dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA, Pusbuk dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 tahun 1987 dan berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 0274/O/1987. Dua aturan legal ini menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsi kontrol yang ketat terhadap pembentukan teks-teks pendidikan dengan mengatur serta membentuk sebuah institusi yang menjaga keberlangsungan kontrol tersebut. Keputusan tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Mendiknas No. 10/O/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan terakhir diatur melalui Keputusan Mendiknas No. 175/O/2001 tanggal 1 November 2001. Pusbuk mempunyai tugas melaksanakan dan membina penulisan, penilaian, seleksi, pengadaan dan produksi serta distribusi buku berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Mendiknas. Dalam studi ini, Pusbuk sebenarnya berperan penting dengan pengembangan naskah, bidang pengadaan dan bidang produksi serta bidang distribusi. Pusbuk bertugas melakukan penilaian terhadap buku, mana yang boleh dipakai atau tidak. Pusbuk akan mengeluarkan daftar buku yang boleh dipakai berdasarkan rangking. Daerah dapat memilih mana buku yang dapat dipakai. Sama halnya dengan keberadaan Puskur pasca hadirnya BSNP, posisi Pusbuk juga berkurang tugas dan wewenangnya dalam pengadaan buku teks. Pusbuk dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menyiapkan model acuan dalam penyusunan buku pelajaran yang meliputi: pedoman penulisan buku, perangkat model buku pelajaran serta konsep.²³

²³ Diatyka, *op.cit*, hal. 101

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) juga merupakan salah satu agen penting dalam ranah pendidikan. Meski tidak secara spesifik terlibat dalam ranah kurikulum, tetapi keberadaannya menjadi penting dalam konteks kekuasaan Orde Baru. BPPN dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 sebagai perwujudan dari Pasal 48 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :

“keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan”

Keberadaan BPPN dibentuk sejak tahun 1989, persisnya setelah UU No. 2 Tahun 1989 disahkan. Mereka yang menjadi anggota BPPN adalah mewakili berbagai unsur-unsur seperti tokoh masyarakat, wakil golongan dalam masyarakat penyelenggara pendidikan, pakar pendidikan dan pejabat pemerintah di bidang penyelenggara pendidikan. Jumlah mereka berdasarkan Kepres No. 30/1989 sebanyak-banyaknya 20 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan Kebudayaan. Hadirnya BPPN waktu itu sebenarnya mengadopsi pola yang dilakukan di beberapa negara lain yang memiliki lembaga yang sering disebut *Board of Education*. Tugas lembaga ini antara lain memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan. Kepengurusan dan keanggotaan BPPN selama lima tahun. Hingga Orde Baru tumbang, tercatat tiga kepengurusan BPPN terbentuk. Periode pertama adalah periode 1989-1993 yang dilantik oleh Presiden Soeharto pada 6 Desember 1989.²⁴ Periode kedua adalah periode 1993-1998.²⁵ Periode ketiga adalah 1998-2003. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan

²⁴ BPPN (1998). *Himpunan Memorandum Pandangan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Masa Bakti 1993-1998*. Jakarta: BPPN, hal. iii.

²⁵ Dalam periode ini terdapat 19 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Pada periode ini dipimpin oleh Prof. Makaminan Makagiansar, MA, Ph.D. Beranggotakan: Letjen TNI (Purn) H. Soetanto Wirjoprasanto (Wakil Ketua), Drs. Suheru Muljoatmodjo, MA (sekretaris), Prof. Achmad Baiquini, M.Sc, Ph.D, Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, MPH, Barnabas Suebu, SH, H. Basyuni Suriamidhardja, Drs. F. Darmanto, Prof. Dr. Lily I. Rilantono, Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo, Drs. H. Muhammad Djazman Alkindi, Mohammad Noer, Prof. Dr. M. Quraish Shibah, MA, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, Drs. GBPH Poeger, Prof. Dr. I Made Bandem, Pdt. Dr. Sularso Sopater, KH. MA Saha; Mahfudh, Tauri Abeng, MA.

pendidikan. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut, BPPN membentuk sebuah kelompok kerja (Pokja) yang diketuai oleh salah seorang anggota BPPN. Dalam rangka kegiatan tersebut, kelompok kerja tersebut melakukan berbagai kegiatan berupa diskusi dan pembahasan dalam forum-forum seperti rapat kelompok, sidang pleno, dan dialog dengan berbagai pihak.²⁶ Hasilnya adalah berupa Memorandum Pandangan. Memorandum inilah yang kemudian diajukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Mendikbud.

Dalam perjalanannya, kiprah BPPN memang tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat luas. Hal tersebut karena wewenang BPPN hanya memberikan nasehat, masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Mendikbud mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan. Persoalan kemudian masukan-masukan tersebut dilaksanakan atau tidak itu menjadi hak dari pemerintah. Meski demikian, keberadaan BPPN dalam ranah pendidikan Orde Baru bisa dipahami dalam dua hal penting. *Pertama*, keberadaan BPPN merupakan basis legitimasi moral sekaligus politik pemerintah. Keberadaan BPPN yang terdiri atas tokoh-tokoh pendidikan merepresentasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sudah didukung dan mendapatkan pengakuan dari BPPN sebagai institusi yang memiliki otoritas akademik. *Kedua*, keberadaan BPPN yang mewakili unsur-unsur masyarakat juga mencerminkan adanya partisipasi dan keterlibatan *stakeholder* penting dalam masyarakat. Dengan cara ini, maka demokratisasi pendidikan dapat dilakukan. Meski praktek tersebut sangat mungkin dilakukan secara artifisial. Keberadaan BPPN berakhir seiring dengan pemberlakuan UU No. 20/2003 yang tidak lagi mengatur pembentukan BPPN.

Selain BPPN, terdapat juga sistem konsorsium bidang ilmu yang juga memiliki peran dalam ranah pendidikan era Orde Baru. Konsorsium merupakan sebuah tim penasehat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk sejak 1967.²⁷ Anggotanya terdiri atas dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tugas mereka untuk menasehati Menteri dalam penentuan kebijakan pengembangan sarana akademik, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang ilmu, dengan pertimbangan bahwa informasi demikian bersifat *bottom-up*, sehingga kalau dijadikan

²⁶ BPPN (1998). *Memorandum Akhir Masa Bakti Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Periode 1993-1998*. Jakarta: BPPN, hal. xi

²⁷ Wawancara melalui *e-mail* dengan Prof. Kamanto Sunarto, SH, Ph.D, 31 Mei 2008.

kebijakan pemerintah akan didukung karena kebijakan memang didasarkan pada usulan perguruan tinggi sendiri. Di era Orde Baru, konsorsium-konsorsium bersifat independen dan mendapat kepercayaan dari Pemerintah. Namun setelah krisis moneter di akhir tahun 1990-an konsorsium dibubarkan dan diganti dengan Komisi Disiplin Ilmu yang kewenangannya jauh lebih terbatas, dan setelah memasuki era reformasi kemudian komisi-komisi inipun justru dibubarkan. Pasca Orde Baru, dalam ranah pendidikan sekarang justru tidak ada lagi badan yang sebagai mitra dapat memberikan pertimbangan independen kepada Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat; semua fungsi komisi disiplin ilmu diambil alih oleh birokrasi.

5.4 Kontestasi BSNP dan Penerbit-Penulis

5.4.1 Modal Para Agen

Pasca Orde Baru tumbang, agen utama yang berperan dominan dalam produksi kurikulum adalah BSNP. BSNP lahir berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pada tanggal 15 Mei 2005. Anggota BSNP sebanyak 15 orang dipilih dan ditunjuk oleh Mendiknas. Anggota BSNP mewakili pakar, praktisi berbagai bidang yang dianggap relevan dengan kajian pendidikan. Dalam tugasnya, BSNP memiliki tugas dan wewenang dalam mengembangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), termasuk didalamnya menyelenggarakan Ujian Nasional (UN)²⁸. Hal tersebut juga diungkapkan Prof. Dr. Djaali, anggota BSNP periode 2005-2009:

“BSNP hanya melaksanakan tugas untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan SNP. Tugas ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional”²⁹

SNP yang dihasilkan BSNP mencakup (delapan) SNP yaitu :1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, 8) Standar Penilaian Pendidikan. Berdasarkan wewenang ini, BSNP memiliki kekuasaan dominan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. Kehadiran BSNP pasca Orde Baru menggeser peran, tugas dan wewenang dua agen

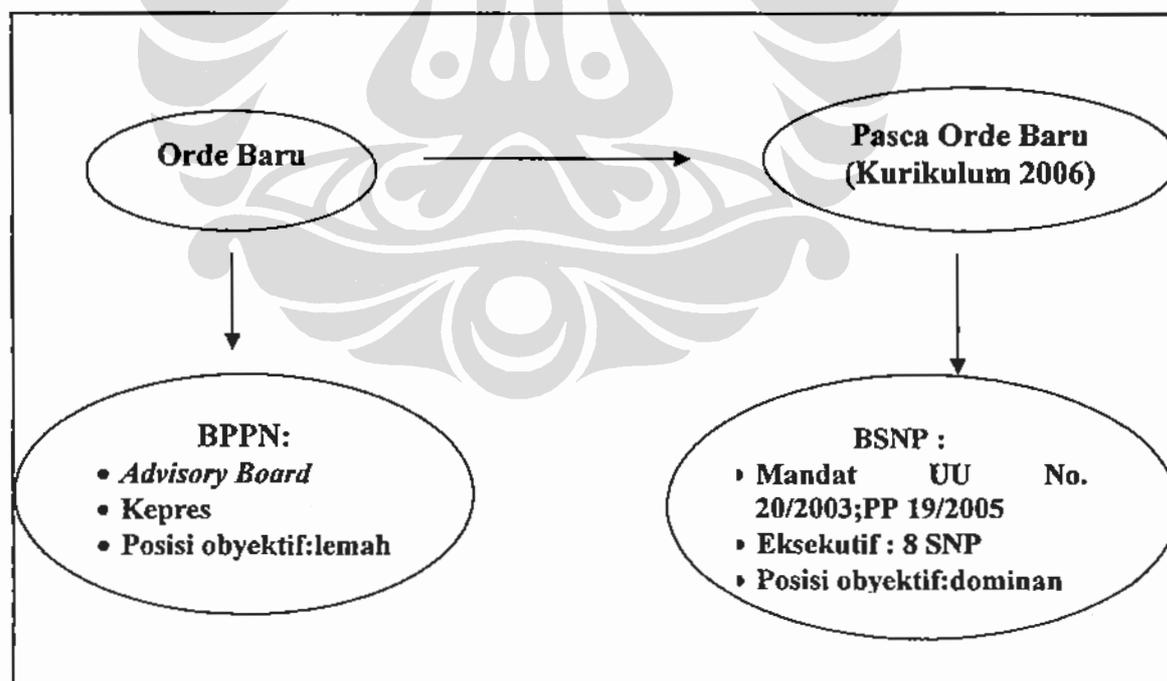
²⁸ Profil BSNP Tahun 2006.

²⁹ Wawancara Prof. Dr. Djaali, anggota BSNP dan Mantan Sekretaris BSNP Periode Mei 2005-Agustus 2006, 28 Mei 2008

lainnya yang pada saat Orde Baru berperan penting yaitu Puskur dan Pusbuk. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, keberadaan BSNP sebenarnya pernah juga pernah diadopsi oleh Orde Baru dengan keberadaan BPPN. Hal mendasar yang membedakan adalah pergeseran kedudukan dan ruang lingkup yang dimiliki BPPN dan BSNP. BPPN dalam kekuasaan Orde Baru hanya berperan sebagai *advisory board* dalam kebijakan pendidikan. Meski, berbagai masukan tersebut juga tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah (dalam hal ini Mendikbud). Secara legal keberadaan BPPN juga hanya berlandaskan Keputusan Presiden. Sebaliknya, BSNP bergerak lebih kuat kedudukannya dibandingkan BPPN. BSNP yang memiliki mandat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2003 bukan hanya sekadar *advisory board*, melainkan sebagai agen eksekutif dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Mereka melaksanakan Ujian Nasional (UN) serta penilaian buku pelajaran. Pemerintah seolah-olah melepaskan tanggung jawab kebijakan pendidikan kepada BSNP yang dianggap memiliki wewenang penuh dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Gambar 5.2

Pergeseran Peran BPPN dan BSNP dalam Ranah Kurikulum



BSNP dengan otoritas dan wewenangnya mengontrol seluruh jalannya pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Salah satu mekanisme kontrol tersebut dilakukan melalui aturan berupa instrumen penilaian tentang Buku Teks Pelajaran untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh mata pelajaran, aturan penulisan dan rambu-rambu penulisan buku teks pelajaran harus berdasarkan aturan BSNP. Aturan dan rambu-rambu ini akan dinilai berdasarkan skor dan menentukan layak atau tidak buku tersebut digunakan sebagai buku teks pelajaran di sekolah. Aturan-aturan itu sebenarnya bertujuan baik, tetapi turunan dari berbagai aturan tersebut menunjukkan satu rambu-rambu yang sangat ketat. Hal itu pula yang dianggap membelenggu oleh penerbit. Pada proses ini BSNP menjadi agen utama yang dominan. Buku yang lulus penilaian BSNP akan mendapatkan keterangan dengan kalimat:

"buku ini telah dinilai oleh BSNP dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran"

Buku teks pelajaran Sosiologi yang ditulis penerbit harus mengacu dan berdasarkan aturan dan rambu-rambu BSNP terlihat sangat ketat, *rigid* dalam koridor penulisannya. Terdapat tiga komponen penilaian, 1) Komponen Kelayakan Isi, 2) Komponen Kebahasaan, 3) Komponen Penyajian. Masing-masing komponen dirinci lagi dengan aturan yang lebih spesifik. Komponen Kelayakan Isi antara lain cakupan materi, kemutakhiran, mengandung wawasan produktifitas, merangsang keingintahuan, mengembangkan kecakapan hidup (*life skills*), mengembangkan wawasan kebhinekaan (*sense of diversity*), mengandung wawasan kontekstual.³⁰ Secara lebih lengkap instrumen tersebut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

³⁰ BSNP (2006). *Instrumen Penilaian Tahap II Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:BSNP, hal. 92-92

Tabel 5.1
Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Sosiologi SMA/MA

No	Komponen Penilaian
1.	<p>KOMPONEN KELAYAKAN ISI</p> <p>A. Cakupan Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluasan Materi 2. Kedalaman Materi <p>B. Akurasi Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akurasi Fakta 2. Akurasi Konsep 3. Akurasi Teori 4. Akurasi Prosedur 5. Akurasi Metode <p>C. Kemutakhiran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 2. Keterkinian/ketermasukan (<i>up to date</i>) fitur. 3. Rujukan termasa (<i>up to date</i>) <p>D. Mengandung Wawasan Produktifitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan Etos Kerja 2. Menumbuhkan semangat inovatif dan kreatifitas. <p>E. Merangsang Keingintahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan rasa ingin tahu. 2. Memberi tantangan untuk belajar lebih jauh dan atau melakukan kerja ilmiah. <p>F. Mengembangkan Kecakapan Hidup (<i>life skills</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kecakapan personal 2. Mengembangkan kecakapan sosial 3. Mengembangkan kecakapan akademik. <p>G. Mengembangkan Wawasan Kebhinekaan (<i>sense of diversity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apresiasi terhadap stratifikasi sosial. 2. Apresiasi terhadap keanekaragaman budaya 3. Apresiasi terhadap kemajemukan masyarakat. 4. Menyajikan contoh dari kehidupan sehari-hari yang tidak menimbulkan bias gender. 5. Menyajikan contoh dari kehidupan sehari-hari yang tidak menimbulkan bias elit sosial-ekonomi. 6. Menyajikan contoh dari kehidupan sosial yang tidak menimbulkan bias urban. 7. Menyajikan contoh dari kehidupan sosial yang tidak menimbulkan SARA. 8. Menyajikan contoh dan tugas pengamatan yang membangun empati peserta didik terhadap lingkungannya. <p>H. Mengandung wawasan kontekstual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan struktur sosial dalam berbagai kehidupan masyarakat, misalnya pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. 2. Menyajikan contoh-contoh perubahan sosial dalam berbagai kehidupan

	masyarakat, misalnya pada tingkat lokal, regional, maupun internasional.
II	KOMPONEN KEBAHASAAN
	A. Sesuai dengan perkembangan peserta didik <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. 2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial-emosional peserta didik.
	B. Komunikatif <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpahaman peserta didik terhadap pesan 2. Kesesuaian ilustrasi dengan substansi pesan.
	C. Dialogis dan Interaktif <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memotivasi peserta didik untuk merespons pesan. 2. Dorongan berpikir kritis pada peserta didik
	D. Lugas <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan struktur kalimat. 2. Kebakuan istilah
	E. Keruntutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertautan antarbab 2. Ketertautan antara bab dan subbab 3. Ketertautan antarsubbab dengan bab. 4. Ketertautan antaralinea dalam subbab. 5. Ketertautan antarkalimat dalam satu alinea
	F. Koherensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Keutuhan makna dalam bab, makna dalam subbab. 2. Keutuhan makna dalam alinea.
	G. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan tatabahasa 2. Ketepatan ejaan
	H. Penggunaan istilah dan simbol/lambang <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi penggunaan istilah 2. Konsistensi penggunaan simbol/lambang.
III	KOMPONEN PENYAJIAN
	A. Teknik Penyajian <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematika 2. Koherensi/Keruntutan konsep. 3. Konsistensi teknik penyajian dalam istilah dan simbol/lambang.
	B. Pendukung Penyajian Materi <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi dalam bab. 2. Pengantar 3. Glosarium 4. Daftar Pustaka 5. Daftar indeks (subjek dan pengarang) 6. Rujukan 7. Rangkuman
	C. Penyajian Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Keterlibatan peserta didik.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Merangsang metakognisi peserta didik. 4. Merangsang kedalaman berpikir peserta didik. 5. Merangsang berpikir kritis. 6. Menciptakan komunikasi interaktif 7. Penyajian bersifat kontekstual 8. Kesesuaian dengan karakteristik mata pelajaran 9. Kemampuan menciptakan umpan balik untuk evaluasi diri.
--	--

Sumber : BSNP (2006)

Anggota BSNP tidak mungkin melakukan tugas dan wewenangnya secara sendirian. Dalam pelaksanaannya, BSNP dibantu oleh kesekretariatan yang membantu tugas operasional sehari-hari. Mereka yang berada dalam kesekretariatan ini adalah para pegawai Depdiknas yang sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain dibantu oleh tim kesekretariatan, BSNP juga dibantu oleh tim ahli yang terdiri dari para pakar dalam berbagai bidang keilmuan untuk masing-masing standar. Dalam hal ini, BSNP memiliki jaringan sosial yang sangat luas untuk merekrut para pakar dalam merumuskan berbagai kebijakan standar pendidikan nasional. Jaringan sosial hanyalah salah satu bentuk modal sosial yang dimiliki BSNP. BSNP memiliki jaringan (modal sosial) yang luas dengan berbagai unsur pendidikan seperti perguruan tinggi (PT), jaringan guru (misalnya melalui PGRI), LSM bidang pendidikan, Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi, kabupaten dan kotamadya.

Namun demikian, diantara jaringan sosial tersebut, BSNP bertumpu pada PT. Sebagian besar anggota BSNP merupakan para akademisi dari beberapa PT yang ada. Jaringan dengan PT tampak terlihat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, misalnya perumusan Standar Isi di masing-masing mata pelajaran yang melibatkan para akademisi perguruan tinggi. BSNP mengundang beberapa tenaga ahli di bidang terkait untuk terlibat dalam perumusan standar isi tersebut. Para akademisi dari PT juga dilibatkan dalam penilaian buku-buku pelajaran untuk seluruh mata pelajaran mulai jenjang SD hingga SMA. Berdasarkan instrumen yang dikeluarkan BSNP, para akademisi diminta untuk menilai sebuah buku pelajaran layak atau tidak diedarkan di pasaran. Penilaian tersebut berbentuk skor yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh BSNP. BSNP-lah yang kemudian memberikan rekomendasi dan legitimasi bahwa buku tersebut layak digunakan karena sudah melalui uji penilaian. Legitimasi ini dianggap sangat 'mujarab' untuk sebuah buku ketika buku tersebut dijual di pasar.

Buku pelajaran sosiologi terbitan GPM untuk kelas X berdasarkan wawancara dengan penulis adalah salah satu buku yang tidak lolos penilaian BSNP. Selain penilaian berdasarkan instrumen, penilaian buku juga dilakukan dengan praktek suap. Praktek ini gencar dilakukan pada saat berlangsung penilaian buku oleh BSNP. Para penerbit berkepentingan agar bukunya dapat lolos penilaian BSNP sehingga bisa dijual di pasar. Penerbit bergerilya mendekati berbagai pihak agar memudahkan penilaian, salah satu caranya adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penilaian buku. Tujuannya agar buku tersebut lolos penilaian. Pemberian uang tersebut diberikan sebelum buku-buku tersebut dinilai. Seorang informan mengatakan:

“saya dengar banyak penerbit memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang memberikan penilaian agar lulus bukunya. Uangnya antara Rp 7.500.000 hingga Rp. 10.000.000. Buku saya termasuk yang tidak lolos penilaian karena tidak memberikan uang. Padahal buku saya adalah buku pertama pelajaran sosiologi yang banyak dipakai. Saya tahu persis integritas Pak Stephans (Direktur GPM) tidak seperti kebanyakan penerbit lainnya.”³¹

Cara itu dianggap sangat membantu para penerbit yang berjuang mendapatkan legitimasi BSNP sebagai buku yang layak terbit dan lolos penilaian BSNP. Akibatnya, banyak buku-buku pelajaran yang berkualitas tetapi tidak lulus penilaian. Hal ini karena tidak memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu dalam proses penilaian tersebut. Buku-buku yang tidak lolos penilaian akan mendapatkan catatan berupa kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki jika buku tersebut ingin diajukan kembali. Ironisnya, banyak buku-buku yang tidak lolos penilaian BSNP tetapi tidak mendapatkan catatan kekurangan apa yang harus diperbaiki. Sementara itu tidak sedikit buku-buku pelajaran yang tidak layak terbit tetapi lolos dalam penilaian.³²Salah satu faktornya adalah praktek suap tersebut. Buku yang tidak lolos GPM sejatinya tidak dapat dijual di pasar, tetapi tidak sedikit penerbit yang menjual buku tersebut secara sembunyi-sembunyi berdasarkan permintaan dari sekolah-sekolah di beberapa daerah. Sebuah buku yang tidak lolos penilaian BSNP memberikan kerugian sangat besar bagi penerbit. Penerbit

³¹ Wawancara Drs. Nursal M. Luth, MM, 25 Juni 2008.

³² Wawancara dengan Stephanus Suparna, Direktur PT Galaxy Puspa Mega, 24 Juni 2008. “....itu dikarenakan tidak dilakukan independen. Masih ada titipan di sana-sini, masih ada pengaruh dari orang-orang tertentu. Itu salah siapa ? Karena pengaruh kekuasaan.”

tidak mendapatkan keuntungan ekonomi akibat tidak lolos dalam penilaian BSNP. GPM menganggap kehadiran BSNP merupakan pendekatan kekuasaan.

“mereka (BSNP, *pen*) berhak memberikan wawasan tertentu yang dapat *dishare* kepada murid. Mereka (BSNP, *pen*) adalah kekuasaan baru dan control baru. Pada dasarnya mereka dapat memberi kemungkinan unculnya penulis baru. Hanya cara menunmbuhak itu harus dengan elegan. Artinya penulis baru jangan membajak. Kita susah bergerak dari pendekatan kekuasaan dengan pengaruh campur tangan.”³³

Dalam merumuskan sebuah standar pendidikan, BSNP yang dibantu oleh para ahli dari perguruan tinggi melakukannya melalui 14 tahapan kegiatan. Cara ini dianggap sebagai prosedur validasi dalam menghasilkan sebuah kebijakan berupa standar pendidikan. Langkah-langkah tersebut meliputi temu awal/penyusunan desain, kajian bahan dasar, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan draft standar, *review* draft standar, lokakarya pembahasan *draft* standar, pembahasan draft standar dengan unit utama, finalisasi draft standar untuk uji publik, uji publik draft standar, finalisasi draft standar, dan rekomendasi draft standar.³⁴ Langkah ini harus ditempuh oleh BSNP agar menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

Modal sosial BSNP tersebut didukung oleh modal budaya yang berbentuk pengetahuan dan keterampilan para anggota BSNP. Ke-15 anggota BSNP ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bermacam-macam³⁵. Misalnya, ada anggota BSNP yang memang memiliki keahlian di bidang evaluasi dan penelitian kebijakan pendidikan, pendidikan anak, anggaran pendidikan, dan sebagainya. Dengan modal sosial dan budaya yang dimilikinya, BSNP dapat mengontrol produksi, distribusi dan konsumsi kurikulum serta buku teks. Kehadiran BSNP pada dasarnya menunjukkan kekuasaan gaya baru dalam proses produksi kurikulum pasca Orde Baru tumbang. Disebut kekuasaan gaya baru karena melalui BSNP lah seluruh mekanisme dan kontrol kebijakan-kebijakan pendidikan berada di tangan BSNP. BSNP diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

³³ Wawancara Stephans Suparna, Direktur PT Galaxy Puspa Mega, 24 Juni 2008.

³⁴ Wawancara Prof. Dr. Djaali, anggota BSNP, 28 Mei 2008. Lihat juga *Program BSNP Tahun 2008* dalam Buletin BSNP Vol. III/No. 1/Maret 2008, hal. 11.

³⁵ Mereka adalah Dr. Anggani Sudono, MA, Prof. Dr. Bambang Suhendro, Prof. Dr. Djaali, Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr. Fauwzia Aswin Hadis, Prof. Dr. Furqon, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Dr. Seto Mulyadi, Dr. Suharsono, MM, M.Pd, Pdt. Weinata Sairin, M.Th, Dr. Zainuddin Arif, Prof. Dr. Zaki Baridwan

Perbedaannya kendali kekuasaan dengan Orde Baru terletak pada gaya kekuasaan yang dikembangkan rezim saat itu. Orde Baru melalui PusKur dan PusBuk mengendalikan dan mengontrol seluruh kebijakan produksi kurikulum dan buku teks secara terkendali melalui mekanisme yang terkoordinasi. Artinya, PusKur dan PusBuk masih memiliki kekuasaan yang besar, berpengaruh dan kuat. Tidak ada yang deterministik diantara keduanya. Satu hal yang membedakan juga adalah kekuasaan Orde Baru dalam hal produksi kurikulum dan buku teks pelajaran masih didominasi dengan cara indoktrinasi ideologi pembangunan sebagai manifestasi kekuasaan penguasa. Ideologi pembangunan itu harus diterjemahkan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, diluar kedua lembaga ini, terlibat juga institusi lain yang menjadi basis legitimasi ideologi yaitu Lemhanas maupun Kejaksaan Agung. Kedua lembaga ini yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kejaksaan Agung, misalnya, dapat memberikan rekomendasi untuk menarik buku pelajaran tertentu jika buku tersebut dianggap 'menyimpang' dari Pancasila dan UUD 1945. Meski demikian, pasca Orde Baru Keajugung masih melakukan praktek yang tidak jauh berbeda dengan Orde Baru. Keajugung sempat menarik peredaran buku-buku pelajaran Sejarah SMA salah satu penerbit buku karena tidak mencantumkan kata 'PKI' dalam penjelasan materi G30 S. Pada konteks ini, kembali kekuasaan negara beroperasi dalam produksi pengetahuan.

Pasca Orde Baru, pola kekuasaan berubah. Pola indoktrinasi khas Orde Baru tidak lagi dikembangkan rezim. Pola kekuasaan dirubah lebih terpusat pada satu lembaga *superbody* yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur dan mengendalikan berbagai kebijakan pendidikan. Di tangan BSNP pula berbagai agen yang lain ditentukan 'nasibnya'. *Pertama*, sehebat-hebatnya penulis buku dengan kualitas penulisan yang baik jika belum mendapat legitimasi dari BSNP bahwa bukunya sudah dinyatakan layak pakai melalui penilaian BSNP maka tidak akan laku di pasaran. Faktor lain juga ditentukan oleh praktek suap yang berlangsung pada saat penilaian buku oleh BSNP. *Kedua*, nasib masa depan siswa dari SD hingga SMA pun tergantung kepada BSNP melalui keberadaan Ujian Nasional (UN). Tiap tahun nilai rata-rata kelulusan termasuk mata pelajaran yang diujikan akan selalu berbeda. Dengan cara ini sebenarnya, BSNP terus melakukan strategi investasi simbolik, yaitu strategi yang terkait dengan semua tindakan

yang melestarikan dan meningkatkan kapital simbolik: yaitu berupa pengakuan atau kehormatan dengan tujuan mereproduksi persepsi dan apresiasi yang paling sesuai demi terjaminnya legitimasi posisi mereka di dalam hirarki sosial. Di antara agen yang lain dalam pertarungan produksi kurikulum ini, BSNP dianggap paling tinggi memiliki kapital simbolik dibandingkan dengan agen lainnya. Akibatnya, posisi BSNP ini dibandingkan dengan posisi agen lainnya sangat berpengaruh terhadap seluruh agen sosial lainnya.

Penerbit buku sangat bertumpu pada kualitas penulis. Se jauh ini para penerbit banyak menggandeng para akademisi untuk menulis buku. Buku teks pelajaran Sosiologi yang diterbitkan oleh GPM ditulis oleh mantan guru Sosiologi SMA yang kini beralih profesi menjadi dosen di salah satu PTS di Jakarta. Tetapi sebagian besar penulis buku sosiologi adalah guru Sosiologi SMA. Realitasnya juga latar belakang pendidikan para guru Sosiologi yang kemudian menulis buku sosiologi tersebut bukan berasal dari Sosiologi. Kebanyakan mereka adalah lulusan dari IKIP dengan jurusan Pendidikan Sejarah, PMP, Pendidikan Geografi³⁶. Bahkan tidak sedikit, guru Sosiologi SMA dengan latar belakang Tata Boga maupun Olah Raga.

Buku sosiologi terbitan GPM sudah ditulis sejak 1985. Awalnya hanya merupakan diktat yang dicetak dalam bentuk stensilan dan dalam jumlah yang relatif terbatas. Diktat tersebut dijualnya secara terbatas dari mulut ke mulut guru-guru Sosiologi SMA di Jakarta. Sejak 1985, buku teks pelajaran Sosiologi terus dicetak secara konsisten. Sampai dengan awal 1990-an, buku ini laris di pasaran dan digunakan sebagai salah satu referensi di berbagai sekolah di DKI Jakarta khususnya.³⁷ Setelah 1990-an, muncul berbagai penerbit baru yang menjadi kompetitor GPM. Pasar GPM pun banyak tersedot oleh kompetitor lainnya. Pendapatan dan penghasilan penjualan buku yang diterima oleh GPM merupakan salah satu bentuk modal ekonomi. Penerbit GPM memiliki jaringan sosial dengan para guru Sosiologi di Jakarta yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bidang Studi Sosiologi SMA. MGMP ini rutin mengadakan pertemuan guna membahas hal-hal penting seperti ulangan bersama, perubahan kurikulum, pelatihan materi/proses pembelajaran, dan sebagainya. MGMP

³⁶ Wawancara dengan Dra. Juju, guru senior Sosiologi SMAN 70 Jakarta, 16 Mei 2008.

³⁷ Berdasarkan informasi dari Drs. Nursal Luth, MM, penulis buku Sosiologi GPM, awal Mei 2008.

Sosiologi sejauh ini cukup aktif mengadakan pertemuan. Ketua dan pengurus dipilih secara bergilir dari perwakilan masing-masing SMA yang ada di Jakarta. Keberadaan MGMP sangat menguntungkan bagi penerbit. Dengan cara itu, pasar GPM semakin terbuka lebar, sehingga jaringan distribusinya semakin bertambah pula. Jaringan distribusi di daerah juga dilakukan melalui guru yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, lokakarya, dan sebagainya. Selain dengan guru, penerbit juga memiliki jaringan dengan beberapa akademisi dari perguruan tinggi. Mereka digandeng untuk mensosialisasikan kurikulum baru kepada guru-guru di berbagai daerah. Sosialisasi tersebut biasanya sekaligus juga bersamaan dengan sosialisasi dan promosi buku baru tersebut.³⁸ Dengan cara ini, penerbit memiliki modal sosial yang cukup tinggi. Selain itu penerbit dan penulis juga dituntut menterjemahkan Kurikulum 2006 yang dituangkan ke dalam buku teks pelajaran. Idealisme berdasarkan pengetahuan mutakhir menjadi hal penting, tetapi tak kalah pentingnya juga adalah idealisme tersebut harus menyesuaikan dengan selera pasar.

“saat ini idealisme saja tak cukup untuk sebuah buku lolos penilaian BSNP. Tetapi kita harus jeli membaca dinamika dan tuntutan masyarakat serta pasar. Misalnya, wacana tentang budaya pop seperti *AFI* ataupun *Indonesian Idol* seharusnya direspon secara cepat oleh penulis buku sosiologi agar tidak ketinggalan zaman”³⁹

Secara ringkas aneka modal yang dimiliki BSNP maupun penerbit-penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Modal para Agen dalam Ranah Kurikulum

Modal	Agen Sosial	
	BSNP	Penulis-Penerbit
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung, kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor, mesin cetak • Penjualan buku
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan dengan Perguruan Tinggi (PT), Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten dan LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan dengan guru melalui MGMP Sosiologi, Perguruan Tinggi (PT), Dinas Pendidikan

³⁸ Wawancara dengan Drs. Zulfikri, M.Ed, Staf Puskur, 13 Mei 2008.

³⁹ Wawancara Drs. Daniel Fernandez, M.Si, 16 Mei 2008

	pendidikan.	di daerah (Kota/Kabupaten)
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Representasi akademisi PT • Rata-rata berpendidikan minimal doktor (S3) sebagian besar Professor. • Memiliki keahlian beragam (anggaran pendidikan, evaluasi dan penelitian pendidikan, pendidikan anak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis buku berpendidikan magister (S2).
Simbolik	<ul style="list-style-type: none"> • Legitimasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, Permen 15/2005 tentang BSNP. • Otoritas pendidikan • Intelektual-Professional 	<ul style="list-style-type: none"> • Idealisme-Selera pasar

Sumber : Alamsyah (2007), diolah

5.4. 2 Posisi Obyektif dan Habitus Agen dalam Ranah Kurikulum

Berdasarkan penjelasan diatas, berbagai modal tersebut dapat menjelaskan posisi dominan dalam ranah kurikulum. Dari segi modal ekonomi, memang agak susah membandingkan antara BSNP dengan penerbit-penulis. Hal yang menarik adalah dari segi jaringan sosial yang dimiliki keduanya. BSNP dengan jaringan sosial di tingkat nasional sangat luas dan itu sangat membantu berbagai program ditingkat penyusunan kebijakan, sosialisasi maupun evaluasi berbagai standar pendidikan nasional. Hal sebaliknya, kondisi berbeda dialami oleh penerbit-penulis. Meski memiliki jaringan sosial yang menasional, tetapi skala dan ruang lingkungnya berbeda dengan jaringan sosial yang dimiliki BSNP. Artinya, BSNP dengan legitimasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas memiliki wewenang yang sangat luas dalam membuka jaringan di tingkat nasional maupun lokal. Dengan legitimasi itu, semakin mengokohkan posisi sosial BSNP dalam ranah pendidikan nasional khususnya kurikulum. Hal sebaliknya dialami penerbit-penulis yang terbatas pada jaringan sosial maupun modal simboliknya. Itu menyebabkan posisi penerbit-penulis termarjinalkan. BSNP berdasarkan latar belakang pendidikan anggotanya memiliki 10 orang guru besar, 3 orang bergelar doktor (S3), 1 orang bergelar

magister (S2). Penerbit hanya mengandalkan penulis dengan latar belakang pendidikan magister (S2).

Berdasarkan modal simboliknya, BSNP sebenarnya mengedepankan otoritas akademiknya dalam mengembangkan berbagai standar pendidikan nasional. Dalam berbagai penyusunan SNP, BSNP selalu berbasis kepada otoritas akademik. Misalnya, dalam menentukan standar penilaian buku teks sosiologi. Itu dirumuskan secara teratur, *rigid* dan cenderung kaku. Tetapi, itu dihasilkan dari satu mekanisme akademik yang mana prosesnya sangat panjang (melalui 14 tahapan). Dengan cara itu sebenarnya akuntabilitas akademik sangat dikedepankan. Di sisi yang lain, aturan penilaian buku tersebut menjadi 'momok' bagi para penulis-penerbit dalam menterjemahkan rambu-rambu tersebut. Kebijakan BSNP dalam menentukan Ujian Nasional (UN) juga menjadi cermin bagaimana otoritas akademik menentukan SNP. Otoritas akademik ini menjadi bentuk habitus BSNP dalam ranah kekuasaan. Penerbit-penulis lebih banyak menampilkan persinggungan antara artikulasi idealisme dengan selera pasar. Sehebat-hebatnya penulis dengan bobot yang sangat berkualitas tanpa mengikuti tren pasar, buku tersebut tidak laku di pasaran. Tren pasar yang dimaksud antara lain penerbit dapat menampilkan contoh-contoh kasus yang aktual di masyarakat dengan berbagai visualiasi yang menarik berupa ilustrasi.

Berbagai ilustrasi yang ada dalam buku sosiologi GPM misalnya banyak menampilkan berbagai dinamika masyarakat. Selain dengan ilustrasi, GPM juga menampilkan berbagai rubrik pengayaan yang mampu meningkatkan nilai jual buku tersebut. Dalam buku teks pelajaran Sosiologi berdasarkan KTSP, GPM menyajikan rubrik 'Mengenal Tokoh' yang berisi biografi singkat para sosiolog. Selain itu, upaya menyesuaikan dengan tren pasar juga dilakukan dengan menulis peta konsep di awal bab. Peta konsep ini dilakukan sebagai pemahaman awal sebelum mendalami penjelasan di suatu bab. Cara yang lain dilakukan dengan cara menulis bagan, grafik sebagai upaya mempertajam analisa. Di bagian akhir selalu ditulis Glosarium yang terdiri atas istilah-istilah yang sudah disinggung di bagian sebelumnya.

5.5 Penutup

Seperti yang dijelaskan Bourdieu tentang pertarungan simbolik dan mengacu kepada penjelasan pertarungan simbolik yang terjadi dalam proses produksi kurikulum Sosiologi SMA, dengan penguasaan modal simbolik yang dominan, BSNP dengan sendirinya membangun kekuasaan simboliknya. Kekuasaan itu juga dibangun atas strategi investasi simboliknya. Atas dasar kekuasaan simboliknya tersebut, BSNP dapat menentukan sekaligus mengubah dunia (dalam hal ini menentukan arah dan orientasi pendidikan). Kekuasaan simbolik yang dimiliki BSNP dapat memberikan berbagai definisi, terminologi dan konseptual terhadap segala sesuatu tentang dunia (pendidikan). Dalam hal ini BSNP dapat memberikan berbagai definisi: lulus/tidak, sebuah buku memiliki kelayakan atau tidak, kualitas pendidikan di satu sekolah rendah atau tidak, dan sebagainya. Dalam kekuasaan simbolik tersebut, BSNP menjalankan seperangkat mekanisme obyektif yang dapat diterima oleh agen-agen lainnya (Puskur, Pusbuk, penulis-penerbit, intelektual universitas dan guru) yang akan dikuasai. Mekanisme ini—melalui seperangkat Standar Nasional Pendidikan—yang diproduksi BSNP membuat kelompok yang didominasi secara tidak sadar masuk ke dalam lingkaran dominasi dan menjadi patuh. Mekanisme obyektif inilah yang terus direproduksi oleh BSNP. Bourdieu menyebutnya dengan *symbolic violence*.

Mekanisme tersebut dijalankan melalui dua cara yaitu eufemisasi dan sensorisasi. Berbagai produk tentang SNP yang ketat, *rigid* bekerja secara halus, tidak sadar dan tidak dapat dikenali. Berbagai standar itu secara permanen direproduksi oleh berbagai agen yang terlibat dalam pertarungan simbolik tersebut. Kepatuhan itu oleh Bourdieu disebut dengan mekanisme eufemisasi. Sementara, mekanisme dalam bentuk pelestarian semua bentuk nilai yang memberi moral kehormatan disebut dengan mekanisme sensorisasi. Mekanisme ini sering dipertentangkan dengan sesuatu yang kontras dengan moral kehormatan tersebut. Misalnya, BSNP mempertentangkan layak atau tidak sebuah buku, atau berkualitas *versus* tidak berkualitas sebuah buku sosiologi SMA. Bisa juga dilakukan dengan cara mempertentangkan mereka yang lulus UN dengan mereka yang tidak lulus UN. Mereka yang lulus UN dianggap cerdas, implikasinya dapat mendongkrak kualitas pendidikan. Sebaliknya, mereka yang tidak lulus UN dianggap bodoh dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan.